

BAB III

PROSES PEMBENTUKAN KERJASAMA EKONOMI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Pada bab 3 ini akan dibahas mengenai proses pembentukan kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area*. ASEAN-China *Free Trade Area* atau sering disebut sebagai ACFTA merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang menghubungkan Negara China dengan Negara-negara regional dikawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). ACFTA dewasa ini termasuk bagian yang tidak terlewatkan dari perkembangan perekonomian global. Pasca terbentuknya, ACFTA berhasil menempatkan posisinya sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar didunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar didunia dalam volume perdagangan.

Bab 3 ini akan dibagi kedalam 2 sub bab berdasarkan dinamika kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area*. Pada sub bab pertama akan membahas ASEAN sebagai kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara dengan potret sejarah singkat terbentuknya ASEAN hingga pada perkembangan perkonomian luar ASEAN. Sub bab kedua akan dijelaskan mengenai hubungan Kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* dimulai dari pengaruh Jepang di kawasan Asia Tenggara hingga kendala dalam penerapan ASEAN-China *Free Trade Area*.

A. ASEAN Kerjasama Regional di Kawasan Asia Tenggara

Sejak dibentuknya PBB pada tahun 1945, gagasan menciptakan sebuah sarana untuk mencapai kerjasama global diperlukan adanya kerjasama regional yang dilancarkan oleh berbagai pihak gagasan tersebut, yaitu kerjasama global dan kerjasama regional dalam piagam PBB dipandang sebagai hal yang sangat diperjuangkan guna mencapai perdamaian dunia. Kedua hal tersebut merupakan tekad yang diambil oleh para pemeriksa PBB agar generasi berikutnya tidak lagi mengalami kesengsaraan sebagaimana yang terjadi pada Perang Dunia I dan II.

Mengacu kepada hal tersebut, kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) secara resmi didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima Negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Singapore, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Adapun perwakilan dari masing-masing Negara yang menandatangani adalah – Adam Malik perwakilan dari Indonesia, Narciso R. Ramos perwakilan dari Filipina, Tun Abdul Razak perwakilan dari Malaysia, S. Rajaratnam perwakilan dari Singapore, dan Thanat Khoman perwakilan dari Thailand.¹

¹ History The Founding of ASEAN, <http://www.asean.org/asean/about-asean/history/>, diakses 16 Februari 2016, jam 13.35.

Gambar III.1

Peta Asia Tenggara²



Sumber: Free World Maps

Dalam deklarasi Bangkok dinyatakan bahwa pembentukan ASEAN atau lebih dikenal dengan Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, memiliki tujuan kerjasama atas anggota-anggota ASEAN dalam usaha mempercepat pertumbuhan pada bidang ekonomi, kemajuan sosial, pendidikan, dan pengembangan kebudayaan, serta guna mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Persamaan kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerjasama ASEAN tanpa mengurangi kedaulatan negara masing-masing anggota. Disamping itu, ASEAN merupakan organisasi regional yang terbuka kepada Negara-negara Asia Tenggara untuk turut berpartisipasi didalamnya. ASEAN menyatakan siap mewakili kehendak kolektif Negara-negara di Asia Tenggara

² Physical Map of Southeast Asia,
<http://www.freeworldmaps.net/asia/southeastasia/physical.html>, diakses 20 Mei 2016, jam 01.25.

untuk menjalin bersama-sama dalam persahabatan, kerjasama, berjuang bersama-sama, saling berkorban untuk kemandirian bagi masyarakat, serta guna mencapai kebebasan dan kemakmuran. Dalam deklarasi tersebut persamaan kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerjasama tanpa mengurangi kedaulatan negara masing-masing anggota.³

Seiring berjalannya waktu ASEAN mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi, dengan disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN*) yang ditandatangani pada tahun 1971. Berselang lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 1976 kelima negara *founding* ASEAN menyetujui Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation/TAC*) yang merupakan landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup saling berdampingan secara damai. Hal ini pula menjadi pendorong bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk bergabung menjadi anggota ASEAN⁴.

Dalam proses menuju ASEAN yang terbuka, damai, stabil, saling peduli dan sejahtera, serta diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Agar tercapainya hal tersebut, ASEAN di usia ke-40 tahun pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura para Kepala Negara menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (*rules-based organization*) dan menjadi

³ Ibid.

⁴ Sekretariat Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN, "*ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-19*", (Jakarta: Kementerian Luar Negeri 2010), hal. 3.

subjek hukum (*legal personality*). Dimana sebelumnya pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Dalam upaya pembentukan Komunitas ASEAN dengan ditadatangannya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 (*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*).⁵

Pada dasarnya ASEAN tidak bersifat integratif namun lebih kepada kooperatif karena hampir seluruh negara-negara anggota memiliki potensi terjadinya konflik dengan negara anggota lainnya. Hubungan antara negara anggota menjadi lebih kuat dengan memburuknya ketahanan pada masing-masing negara di Asia Tenggara. Memburuknya ketahanan tersebut berasal dari kemanan yang datang dari dalam negara itu sendiri, sehingga memicu menimbulkan ancaman eksternal yang akan dihadapi. Disatu sisi sumber ketidak stabilan di dalam negeri bersifat atas faktor politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya dan ideologi.

Maka berdasarkan hal tersebut, dalam Piagam ASEAN tercantum ketetapan ASEAN untuk membentuk komunitas ASEAN pada tahun 2015. Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar yaitu Komunitas Politik Kemanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

⁵ Ibid., hal. 5.

1. Latar Belakang Kerjasama Ekonomi ASEAN

Tujuan dari pembentukan ASEAN sebagai mana yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN. Pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Minister*) ke-39 pada tahun 2007 disepakati mengenai naskah Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN beserta jadwal strategis yang mencakup inisiatif-inisiatif baru dan pemetaan yang jelas untuk mencapai pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan sebelum disepakatinya Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, negara-negara anggota ASEAN telah mengalami kemajuan ekonomi, namun krisis ekonomi yang terjadi telah mengakhiri masa perkembangan ekonomi tersebut. Krisis ekonomi yang berawal di Thailand, memberikan dampak domino kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Laos dan Filipina. Kejadian krisis tersebut membuktikan adanya saling keterkaitan ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.⁶ Krisis ekonomi 1997 merupakan krisis yang telah menjatuhkan sistem ekonomi di Asia terutama di Asia Tenggara dan Korea Selatan. Terjadinya krisis diawali dengan tingginya pinjaman jangka pendek dari Negara-negara seperti Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan terhadap Dollar A.S. Hal ini menyebabkan melemahnya nilai tukar mata uang sehingga terjadinya

⁶ Alif Fikri Wibowo, "*Pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) dan Hubungan Ekonomi ASEAN-Cina*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011), hal. 17-18.

depresiasi⁷ seperti; Rupiah di Indonesia atau Bath di Thailand terhadap Dollar A.S., sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dan kreditor asing kemudian menghasilkan pelarian modal dalam jumlah yang sangat besar. Dengan demikian banyak negara Asia yang kekurangan aset mata uang asing (Dollar A.S.) dan mengalami kesulitan membayar hutang yang menumpuk.⁸

Dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN terdapat *master plan* untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengedepankan langkah-langkah integrasi ekonomi yang kemudian akan ditempuh melalui pelaksanaan berbagai komitmen yang jelas dengan sasaran dan jangka waktu yang rinci. Langkah-langkah integrasi ekonomi diprioritaskan kepada 12 sektor yang mencakup produk-produk berbasis pertanian, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistik.⁹ Semua ini tidak lepas dari tujuan pembentukan ASEAN dengan adanya keinginan bersama antara negara-negara yang tergabung untuk meningkatkan perekonomian masing-masing bangsa. Bahkan sejak terbentuknya hingga saat ini, ASEAN senantiasa mengedepankan agenda-agenda ekonomi kedalam setiap kesempatan interaksi.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-13 ASEAN. Tujuan dari disahkannya Cetak Biru

⁷ Depresiasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing karena mekanisme pasar.

⁸ Yasmin Sungkar (ed.), *"Strategi ASEAN Dalam Perluasan ASEAN+3"*, (Jakarta: LIPI Press 2005), hal. 36.

⁹ Sekretariat Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN, *Loc.Cit.*, hal. 24-25.

adalah untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain hal-hal tersebut, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

Disamping itu, pada *ASEAN Ministerial Meeting* di Singapore tahun 1977 dikemukakan mengenai perlu adanya peningkatan kerjasama ekonomi dengan pihak lain baik itu negara, kelompok negara, dan organisasi internasional di luar ASEAN untuk memulai menjalin hubungan persahabatan serta saling mendapatkan keuntungan bagi semua pihak.¹⁰ Hal ini menunjukkan keseriusan ASEAN menginginkan kerjasama dalam bidang ekonomi baik dengan lingkungan internal maupun dengan negara lain di luar kawasan Asia Tenggara.

2. Perkembangan Perekonomian Intra ASEAN

Kerjasama intra ASEAN secara tegas memiliki dimensi yang condong terhadap ekonomi dan sosial. Hal itu selaras dengan sasaran utama ASEAN yaitu “untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan dan kemitraan (*equality and partnership*) untuk memperkuat landasan bagi sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang makmur dan

¹⁰ ASEAN Secretariat 1977, “*Joint Communique The Tenth ASEAN Ministerial Meeting*”, http://www.asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-tenth-asean-ministerial-meeting-singapore-5-8-july-1977, diakses pada 18 Februari 2016, jam 00.25.

damai”.¹¹ Dalam proses terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, ASEAN terus melakukan usaha untuk mengembangkan kerjasama hingga menuju pembentukan masyarakat ASEAN hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama antara anggota di berbagai bidang. Dalam kerjasama ekonomi, ASEAN telah merintis dari tahun 1960-an. Namun, pada masa tersebut kerjasama di bidang ekonomi masih sangat terbatas. Seiring dengan meningkatnya hubungan kerjasama antara anggota mulai meningkat, kerjasama di bidang ekonomi pun turut meningkat. Kerjasama tersebut teralisasi dalam program-program yaitu; *ASEAN Industrial Project Plan* pada tahun 1976, *Preferential Trading Arrangement* atau ASEAN PTA pada tahun 1977, *ASEAN Industrial Complementation Scheme* tahun 1981, *ASEAN Joint Ventures Scheme* pada tahun 1987. Hal tersebut terus diupayakan oleh negara anggota-anggota ASEAN guna menghadapi lajunya arus globalisasi.

Preferential Trading Arrangements (PTA) merupakan salah satu dari program-program yang teralisasi dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Bentuk kerjasama ekonomi yang pertama kali terjalin antara negara anggota, dan merupakan yang pertama kali terjadi di kawasan Asia. Dalam skema PTA berlaku pengurangan tarif bagi barang-barang yang dipedagangkan yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

Dalam PTA diterapkan prioritas tarif yang dikenal dengan istilah MoP (*Margin of Preference*) yang merupakan sebuah aturan yang memuat semua barang komoditi yang berasal dari ASEAN akan dikenakan prioritas tarif yang besarnya

¹¹ CPF. Luhulima, dalam Sugeng Riyanto, “*ASEAN Regional Forum Upaya Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Pasifik*, (Yogyakarta: LP3M UMY 2009), hal. 77.

lebih rendah dari tarif *Most Favoured Nation* (MFN)¹² dari negara-negara anggota ASEAN.¹³ MoP dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari tingkat tarif yang diberlakukan di setiap negara anggota ASEAN. Selain itu dalam skema PTA diberlakukan pula keharusan kandungan muatan lokal sebesar 50 persen. Oleh karena itu, setiap komoditi yang diperdagangkan dalam PTA harus memiliki kandungan yang benar-benar berasal dari negara anggota ASEAN yaitu sebesar 50 persen. Bahkan disamping itu setiap negara dalam skema PTA mempunyai daftar pengecualian (*exclusion list*), yaitu daftar barang yang tidak diperdagangkan atau dikecualikan yang diajukan oleh setiap negara.

Namun, dalam perkembangannya implementasi dari PTA berjalan kurang efektif di antaranya adalah, pertama, banyaknya barang-barang yang masuk kedalam daftar pengecualian (*exclusion list*) sehingga tidak memperoleh penurunan tarif. Selama sepuluh tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan, dari 12.783 jenis barang yang didaftarkan, hanya sebesar 2,7 persen yang diberikan fasilitas PTA.¹⁴ Kedua, terdapat kesulitan dalam membuktikan kandungan muatan lokal barang dan kurangnya penyebaran informasi mengenai PTA terhadap pengusaha di negara-negara anggota ASEAN. Hal ini yang mendasari penyebab

¹² *Most Favoured Nation* (MFN), prinsip menyatakan bahwa setiap fasilitas atau keringanan yang diberikan oleh suatu negara terhadap impor barang dari suatu negara tertentu harus diberikan pula kepada barang yang sama yang berasal dari negara anggota GATT (*Geeral Agreement on Tariff and Trade* sekarang WTO) yang lain. Dengan demikian, maka tidak ada negara yang diperlakukan lebih buruk dari negara yang lain.

¹³ Prabowo & Wardoyo, "*AFTA Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: BPFE 1997), hal. 9.

¹⁴ Sarah Anabarja, "*Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community*", (Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur), hal. 57.

tidak berjalan efektifnya program PTA dikarenakan sistem yang diterapkan tidak begitu efektif, maka para pejabat ASEAN segera mengkaji ulang PTA pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992 dimana disepakati pembentukan program baru yaitu ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang dikhususkan pada konsentrasi di bidang perdagangan dengan mengkaji segala bentuk kekurangan dari PTA.¹⁵

Pembentukan AFTA pada KTT ASEAN ke-4 didorong oleh kecenderungan negara-negara dalam kawasan yang sama untuk membentuk sebuah integrasi ekonomi yang lebih dalam setelah PTA. Hal ini merupakan integrasi ekonomi yang bertahap setelah PTA. Kecenderungan seperti yang nampak pada kerjasama ekonomi regional seperti EU, ASEAN pun demikian, setelah tahapan ASEAN PTA, AFTA segera digagas. Disisi lain, pembentukan AFTA mencerminkan perkembangan situasi ekonomi dan politik yang terjadi tidak hanya di lingkungan ASEAN namun juga dinamika pada lingkungan internasional. Faktor eksternal tentang negoisasi perdagangan multilateral, kemajuan cepat dari pembentukan Pasar Tunggal Eropa (*European Commo Market*), serta lahirnya NAFTA (*North American Free Trade Area*). Pembentukan AFTA dinilai sangatlah penting untuk meningkatkan daya tarik ASEAN dalam dunia perdagangan internasional serta menarik investasi asing ke dalam lingkungan ASEAN.

¹⁵ Alif Fikri Wibowo, *Loc.Cit.*, hal. 22

ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) merupakan perwujudan dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk ASEAN. Dengan adanya AFTA diharapkan perekonomian di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih efisien, kompetitif, dan menarik bagi penanaman modal. Dalam AFTA diterapkan di mana tidak ada hambatan tarif (bea masuk -05%) maupun hambatan nontarif¹⁶ bagi negara-negara anggota ASEAN melalui, *Common Effective Preferential Tariff Scheme* (CEPT)-AFTA. CEPT merupakan program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh anggota ASEAN.¹⁷ CEPT pada dasarnya dirancang untuk melancarkan proses dalam pembentukan AFTA. Sehingga, isi dari CEPT merupakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh negara ASEAN dalam melaksanakan AFTA. Selain itu AFTA menyepakati atas adanya harmonisasi tarif di antara negara anggota, masing-masing bebas menentukan tarif untuk perdagangan dengan bukan negara anggota.¹⁸

Kemudian, sebagai bentuk lanjutan dari integrasi ekonomi ASEAN, pada KTT ASEAN ke-5 tahun 1995 di Bangkok, negara-negara anggota ASEAN

¹⁶ Hambatan non-tarif adalah hambatan non-moneter terhadap produk-produk ataupun jasa yang disediakan oleh pihak asing. Hambatan non-tarif bisa berupa peraturan-peraturan yang memberatkan produk asing masuk ke suatu negara.

¹⁷ Yasmin Sungkar (ed.), *Loc.Cit.*, hal. 1.

¹⁸ CPF. Luhulima et.al, " *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hal. 112

sepakat untuk mengusung ide “*The Greater ASEAN Economic Cooperation*”. Dalam konferensi negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadakan percepatan dan pendalaman pada kerjasama ekonomi melalui AFTA. Kerjasama yang terus berkembang tersebut mendatangkan hasil yang nyata. Terkait *production base* yang merupakan pilar inti dari kerjasama ekonomi ASEAN, capaian ASEAN cukup signifikan dalam bidang arus perdagangan barang bebas yaitu penurunan rata-rata tarif dalam kerangka CEPT_AFTA dari 4.43% pada tahun 2000 menjadi 1.32% pada tahun 2008 dan selanjutnya pada tahun 2010 sekitar 99,11% dari produk yang masuk dalam *Inclusion List* (IL) sudah dihapuskan.¹⁹

Seiring dengan berjalannya AFTA Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong mengusulkan gagasan yang lebih besar dengan pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, November 2002. AEC merupakan bentuk lanjutan dari proses integrasi ekonomi ASEAN. Kemudian pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyetujui pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) yang ditargetkan akan mencapai integrasi penuh ASEAN pada tahun 2020 sesuai dengan tujuan pembentukan *ASEAN Community* yang ditetapkan dalam ASEAN Vision 2020, yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu *ASEAN Political-Security Community* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). Melalui kerjasama ekonomi, diharapkan akan terjadi penyatuan ekonomi ASEAN dalam bentuk masyarakat ekonomi ASEAN yang

¹⁹ Sekretariat Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN, *Loc.Cit.*, hal. 72.

ditandai dengan pergerakan arus barang, jasa, investasi, dan modal yang bebas dan tanpa hambatan.²⁰

Pada tahapan selanjutnya dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina Januari 2007, para kepala pemerintah menyepakati untuk mempercepat jadwal pembentukan *ASEAN Community* yang semula ditetapkan pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. Namun, target pembentukan ketiga pilar utama tersebut tidak secara bersamaan. Target pencapaian disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan politik pada masing-masing negara anggota ASEAN. Percepatan pembentukan *ASEAN Community* terjadi dikarenakan adanya kekhawatiran ASEAN terhadap perkembangan ekonomi dunia. Dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat, ada kekhawatiran bahwa Asia Tenggara akan tertinggal jauh dari pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan atau negara lain.²¹ Gagasan membentuk *ASEAN Economic Community* (AEC) diharapkan mampu mengalirkan kekuatan baru untuk berintegrasi ke dalam sesuai dengan ASEAN Vision 2020, dan meningkatkan daya saing yang kompetitif serta menguatkan integrasi ekonomi pada negara-negara anggota ASEAN.

3. Perkembangan Perekonomian Luar ASEAN

Setelah terbentuk secara menyeluruh dan menunjukkan sikap untuk aktif di dalam tubuh ASEAN sendiri, harapan dan pencapaian ASEAN tidak hanya

²⁰ Sarah Anabarja, *Loc.Cit.*, hal. 58.

²¹ Ratna Shofi Inayati, "*Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented Ke People Oriented*", (Jakarta: LIPI 2007), hal. 117.

berhenti disitu, ASEAN memulai melebarkan sayapnya dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di luar ASEAN. Sejak tahun 1974 ASEAN telah memulai mitra dialog dengan Australia. Kemudian diikuti oleh Selandia Baru pada tahun 1975, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Uni Eropa pada tahun 1977, Republik Korea pada tahun 1991, India 1995, China dan Rusia di tahun 1996. ASEAN sejak awal berdiri dan terbentuk, ASEAN telah banyak menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1997, Kepala Negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 dengan tujuan menciptakan kawasan yang stabil, makmur, dan lebih kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang merata, ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi.

Guna mewujudkan ASEAN Visio 2020, maka pada November 2002, ASEAN memulai berkerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN dalam bidang ekonomi. Di antaranya, yaitu ASEAN+3 yang meliputi ASEAN-China *Free Trade Area* yang disepakati pada November 2004, ASEAN-Japan *Free Trade Area* yang disepakati pada 2008. ASEAN-Korea *Free Trade Area* pada Desember 2005, dan pada ASEAN+6 yang meliputi Australia, Selandia Baru, serta India.²² Pada 2007, para kepala negara menyepakati untuk mempercepat pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Berbagai bentuk keepakatan ASEAN dengan negara-negara sekitar, merupaka suatu bukti atas keseriusan ASEAN dalam meningkatkan pertumbuhan

²² Edy Burmansyah, "Rezim Baru ASEAN", (Yogyakarta: Pustaka Sempu 2014), hal. 34-35.

dalam bidang ekonomi. Diantara kerjasama ASEAN dengan negara-negara tetangga, adalah:

ASEAN+3 (China, Jepang, Korea Selatan). Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997 telah mendorong negara-negara ASEAN untuk berpaling kepada negara-negara tetangga terdekat di kawasan Asia Timur, yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan. Terbentuknya kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan efek domino dari krisis ekonomi yang menimpa negara-negara Asia. Hal ini menjadi suatu realitas adanya interdependensi di antara perekonomian negara-negara tersebut. Regionalisme baru yang melibatkan ASEAN, Jepang, China, dan Korea Selatan pertama kali memperoleh momentum pada saat berlangsungnya ASEAN Informal *Summit* ke-dua di Malaysia pada Desember 1997.

Pada tahapan awal ditekankan pada proses kegiatan yang berorientasi pada kerja nyata. Selanjutnya pada tahun 1999 proses kerjasama ASEAN+3 ditetapkan sebagai forum resmi ketika para pemimpin kedua kawasan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kerjasama Asia Timur pada ASEAN *Plus Three* (APT) *Summit* ke-tiga di Manila. Sejak saat itu KTT ASEAN *Plus Three* (APT) diadakan setiap tahun dan pertemuan pada berbagai tingkat antara ASEAN dan ketiga negara Asia Timur. Dalam perkembangannya, forum ASEAN+3 memperluas cakupan kerjasama hingga meliputi isu-isu pertanian, keuangan, tenaga kerja, iptek perdagangan, investasi, lingkungan, kesehatan, seni dan budaya, energi, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, politik dan keamanan.

Kedudukan ASEAN merupakan aktor yang penting dalam menarik ketiga negara Asia Timur (Jepang, China dan Korea Selatan) untuk saling bekerjasama dalam ASAN+3. Negara-negara Asia Timur dalam perjalanannya selalu berusaha untuk menjadi satu entitas. Namun, memang hingga saat ini hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan karena pada dasarnya banyak perselisihan antara ketiga negara Asia Timur tersebut khususnya pada permasalahan sejarah (*Historical barrier*).

Adanya saling ketergantungan antara negara-negara Asia Tenggara dan ketiga negara Asia Timur, khususnya negara-negara Asia Tenggara yang lebih membutuhkan ketiga negara Asia Timur dalam bidang pengembangan perekonomian menjadikan negara-negara tersebut berusaha memberikan hal-hal positif yang dibutuhkan guna mengimbangi lajunya proses globalisasi. Dari segi perdagangan, ketiga negara Asia Timur merupakan lima besar mitra dagang bagi ASEAN. Pada Tahun 2008 misalnya, secara berurutan yaitu Jepang sebesar (214,440 Juta US\$), Uni Eropa (208,291 juta US\$), China (196,883 juta US\$), A.S. (186,242 juta US\$) dan Korea Selatan (78,250 juta US\$).²³ Oleh karena itu, ketiga negara Asia Timur, memiliki posisi yang penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Namun, dari ketiga negara Asia Timur China memiliki presentase pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dari tahun 2003 hingga 2009 misalnya, pertumbuhan perdagangan antara ASEAN dan China sebesar 22,62 persen dan merupakan pertumbuhan perdagangan terbesar bagi

²³ ASEAN Statistical Yearbook 2010, http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/asean_statistical_2010.pdf, diakses 5 Maret 2016.

ASEAN. Pada periode yang sama Jepang hanya sebesar 7,40 persen dan Korea Selatan sebesar 13,64 persen.²⁴

Dari hasil data tersebut secara total jumlah, Jepang masih diposisi tertinggi, namun pada presentase pertumbuhan perdagangan China lebih tinggi daripada presentase pertumbuhan perdagangan ASEAN dengan Jepang. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan hubungan ekonomi antara ASEAN dan China akan terus berkembang dan bahkan akan menggantikan peran Jepang bagi ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi.

B. Hubungan Kerjasama ASEAN-China Free Trade Area

ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan China, dengan menghilangkan atau mengurangi segala bentuk hambatan perdagangan, baik tarif atau non tarif, peningkatan akses pasar jasa, pertaturan dan ketentuan investasi, peningkatan integrasi ekonomi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Pembentukan ACFTA ditandai dengan penandatanganan ASEAN-China *Comprehensive Economic Cooperation* oleh kepala negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Edy Burmansyah, *Lo.Cit.*, hal. 36.

1. Pengaruh Jepang di Kawasan Asia Tenggara

Konflik antara negara bertetangga bukanlah suatu penghambat terjalannya kerjasama bilateral, multilateral maupun regional. Suatu konflik atau peperangan justru menjadi sebuah kekuatan yang mendorong terbentuknya kerjasama regional, dapat dilihat dari terciptanya Uni Eropa. Dalam Perang Dunia ke-2 yang telah banyak merenggut korban jiwa dan kehancuran secara besar-besaran serta tonggak perekonomian negara-negara Eropa yang runtuh. Posisi Jerman dan Perancis dua negara yang saling bermusuhan, pasca Perang Dunia ke-2 dapat bersama-sama memporori terbentuknya kerjasama ekonomi di Eropa. Kerjasama ekonomi pada dasarnya dimaksudkan guna menciptakan saling ketergantungan yang semakin tinggi dan luas, sehingga akan sulit bagi suatu negara untuk memerangi mitra kerjasamanya tanpa menciderai dirinya sendiri.²⁶ Keadaan tersebut yang diharapkan oleh ASEAN terhadap hubungan yang terjadi antara China dengan Jepang. Harapan akan kedua negara tersebut mampu mendongkrang pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Kedudukan Jepang di Asia Tenggara di masa Perang Dunia ke-2 dianggap sebagai hal yang positif, karena Jepang merupakan mitra dialog penuh di ASEAN. Konflik di masa lalu bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi hubungan yang lebih baik antara negara-negara tetangga di Asia Tenggara dengan negara-negara lain di kawasan Asia Timur. Demikian dengan hubungan ASEAN dengan China yang terus berkembang pesat, seiring dengan perubahan orientasi politik luar negeri dan ekonomi China yang semakin terbuka. China yang sebelumnya di

²⁶ Yasmin Sungkar (ed.), *Loc.Cit.*, hal. 99.

pandang oleh ASEAN sebagai basis pusat komunisme di Asia Tenggara, China berhasil menjelma menjadi mitra yang sangat bersahabat dengan ASEAN.

Negara-negara bekas jajahan Jepang di Asia Tenggara pada umumnya tidak terlalu peduli dengan masalah tersebut. Berbeda dengan China, yang melihat perbutan Jepang di masa lalu merupakan bukti bahwa Jepang belum berubah dan tidak melihat atas perasaan negara-negara tetangga yang pernah menjadi korban kekejaman. Meskipun Jepang merupakan investor utama yang turut mendorong pertumbuhan perekonomian China, namun China tetap menaruh kecurigaan terhadap Jepang.²⁷

China memang sebuah fenomena yang tidak mengejutkan mata dunia. Ketika Uni Soviet ambruk banyak ahli pakar yang menyebutkan akan terjadi banyak benturan perdaban (*the clash of civilization*). Namun, dari sekian banyak prediksi dan dugaan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa China akan menjadi sebuah fenomena dalam rentang waktu sepuluh tahun sampai dengan lima belas tahun kemudian. Namun, secara tiba-tiba China diprediksi akan tumbuh dengan sangat cepat dalam sektor ekonomi dan akan melebihi Jepang.²⁸

Persaingan kedua negara antara Jepang dan China tidak hanya mencerminkan sikap China terhadap Jepang, namun juga persepsi Jepang terhadap China. Konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah meningkatnya anggaran pertahanan. Pengembangan kekuatan militer

²⁷ Ibid., hal. 102.

²⁸ Ivan A. Hadar, "Perdagangan Bebas ASEAN-China: Berdagang Untuk Siapa?" (Jakarta: Jurnal Sosial Demokrasi), hal. 18.

merupakan fenomena yang lumrah dari pembangunan suatu negara. Namun, peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh China dianggap sebagai potensi ancaman yang nyata kepada negara-negara kawasan Asia Timur. Dari data yang ada, China mengalami peningkatan anggaran militer rata-rata sebesar 12,9% sejak tahun 1989 sampai 2010. Pada tahun 2010 China menganggarkan sekitar 77,9 miliar US\$ meningkat sebesar 7,5% dari tahun sebelumnya 2009 yang hanya sebesar 70,27 miliar US\$.²⁹ Pada dasarnya pengembangan kekuatan militer China ditujukan untuk pertahanan wilayah dan hal tersebut masih dianggap belum memadai. Karena dengan sekitar 20 ribu kilometer perbatasan darat dan 14 ribu kilometer garis pantai, China membutuhkan pengamanan dari kekuatan militer yang besar.

Disamping itu kompetisi yang terjadi semakin intensif dan menjadi persaingan dengan skala besar. Pemerintah masing-masing negara seperti tidak sanggup untuk membendung fakta bahwa dinamika globalisasi yang paling intensif terjadi di kawasan Asia Pasifik. Semua hal ini terjadi karena faktor ekonomi China yang tumbuh dengan pesat. Peranan China sangat jelas, yakni menggantikan posisi dan dominasi Jepang. Dinamika kawasan berubah karena ekonomi Jepang bergerak lambat.³⁰

²⁹ Global Security 2011, "*China's Defense Budget*", <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>, diakses 5 Maret 2016, jam 00:56.

³⁰ Launa, "*ACFTA: Menengok Jalan China*", (Jakarta: Jurnal Sosial Demokrasi), hal. 54.

Dalam konteks lain, China sadar akan kontribusi Jepang dalam pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Inilah yang menyebabkan China mendekati diri kepada Asia Tenggara. China tidak ingin Jepang memonopoli Asia Tenggara secara ekonomi. Usaha China untuk membendung pengaruh ekonomi Jepang di kawasan Asia Tenggara, tercermin dalam kesepakatan pembentukan ACFTA. China terlihat sangat aktif dalam mengajukan proposal kerjasama kepada ASEAN pada tahun 2002, hasilnya adalah dengan dibentuknya kerjasama ACFTA yang merupakan *Free Trade Area* yang dibentuk di Kawasan Asia. Melihat atas keberhasilan China, Jepang secara langsung pada tahun berikutnya mengajukan hal serupa, yaitu ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* pada tahun 2003.³¹

Jepang sebagai negara maju pada segi ekonomi (*developed country*), Jepang segera berbenah dan berambisi untuk meningkatkan peran dan kekuatannya di lingkungan regional dan global. Jepang berkeinginan untuk kembali menjadi negara yang memiliki kekuatan militer yang dapat secara terbuka digunakan untuk pertahanan dan misi kemanan luar negeri, serta berambisi untuk menjadi anggota tetap Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini mendapatkan respon keras dan penentangan dari China, hal ini dikarenakan kekhawatiran bahwa Jepang akan kembali menjadi negara militer yang agresif dan ekspansionis. China secara jelas tidak menginginkan Jepang hadir kembali sebagai kekuatan ekonomi dan militer regional maupun global. Selama Jepang masih dicitrakan

³¹ Edy Burmansyah, *Loc.Cit.*, hal. 39.

sebagai negara yang belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari kejadian masa lalu sebagai negara agresor, ambisi Jepang akan tetap mendapat tantangan.

Motivasi yang mendorong China untuk membentuk FTA dengan ASEAN yang bersumber pada dinamika faktor internal maupun internasional. Semua hal tersebut menempatkan ASEAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan ekonomi China, sehingga China terus berusaha untuk mendekati diri kepada ASEAN. Hingga terjalinya kesepakatan pembentukan ACFTA.

2. Terbentuknya Kerjasama ACFTA

Sejak terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1990, diskusi tentang tatanan dunia didominasi oleh enam skenario. Francis Fukuyama meramalkan menguatnya kecenderungan demokratisasi, sedangkan menurut John Maersheimer melihat akan terjadinya renaissance perang antarnegara bertetangga. Sementara itu, menurut Samuel Huntington (1996) melihat akan terjadinya konflik peradaban antara Barat dan Islam. Sedangkan Paul Kennedy (2002) mewacanakan untuk mencari bentuk baru *global governance* sebagai dampak globalisasi. Selain itu, beberapa penulis seperti Robert Kagan, usai Invansi di Iraq 2003, menggambarkan akan terjadinya era panjang unilaterisme AS yang menjadi satu-satunya negara adidaya.³²

Namun, dalam semua skenario tersebut tak satupun yang mempertimbangkan akan kebangkitan China. Dan kini kekuatan ekonomi negara

³² Ivan A Hadar, "*Cina, ACFTA dan Kita*", (Jakarta: Jurnal Sosial Demokrasi 2010), hal. 48.

berpenduduk terbesar di dunia berpengaruh signifikan pada konstelasi kekuatan politik global. Hanya dalam waktu kurang dari satu dasawarsa, China bangkit dari sebuah ekonomi pinggiran menjadi pemain utama dalam pasar global.

Sebelumnya pada tahun 1990-an pula, belum ada hubungan secara resmi antara ASEAN dengan China. Meskipun hubungan bilateral beberapa negara anggota ASEAN secara individual dengan China sudah terbentuk, misalnya Thailand. Pada Juli 1991, Menteri Luar Negeri China saat itu, Qian Qichen menghadiri pembukaan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* ke-24 di Kuala Lumpur. Pada kesempatan tersebut Menlu China Qian Qichen menyampaikan keinginan pemerintah China untuk dapat berkerjasama dengan ASEAN. Hal ini disambut positif, dengan respon yaitu sebuah kunjungan Sekjen ASEAN Dato' Ajit Singh ke Beijing pada September 1993 dan menyepakati pembentukan dua *Joint Committe* yaitu pada bidang kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama ekonomi dan perdagangan yang diresmikan pada Juli 1994 di Bangkok oleh Sekjen ASEAN dan Departeen Luar Negeri China.

Membaiknya hubungan antara ASEAN dan China pada petengahan 1990-an diikuti dengan meningkatnya status China, awalnya hanya diberikan status mitra konsultasi, kini menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Status tersebut ditetapkan pada AMM ke-29 di Jakarta pada tahun 1996, setelah sebelumnya pada tahun 1994 China telah menjadi mitra dalam ASEAN Regional Forum (ARF).³³

³³ Alif Fikri Wibowo, *Loc.Cit.*, hal. 41

Dalam bidang politik dan keamanan, hubungan ASEAN-China ditunjukkan dengan niat China bahwa kehadiran China bukanlah merupakan suatu ancaman. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tahun 2002 guna mengurangi ketegangan teritorial dan membuka jalan untuk mengadakan diskusi bersama terhadap penyelesaian konflik laut China Selatan. Deklarasi tersebut kemudian diusul dengan ditandatanganinya *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* pada KTT ASEAN-China ke-7 pada tahun 2003 di Bali.

Ide untuk membentuk ACFTA pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji dalam ASEAN+3 Summit di Singapura November 2001. Melihat hal tersebut dibentuklah kelompok ahli dari kedua belah pihak yang disebut ASEAN-China *Expert Group*, guna mempelajari kemungkinan terbentunya ACFTA. Pada tahun 2002 kelompok ahli mengemukakan bahwa ACFTA dalam jangka waktu 10 tahun akan menciptakan kawasan ekonomi dengan populasi 1,7 milyar penduduk, dengan total GDP (*Gross Domestic Product*) regional mencapai 2 triliyun dolar AS dan total perdagangan keduanya diperkirakan mencapai 1,23 triliyun dolar AS.³⁴ Dalam proses selanjutnya pada ASEAN-China *Summit* ke-6 tahun 2002 di Kamboja, para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Zhu Rongji menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*.³⁵ Kerangka tersebut merupakan landasan kerjasama dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang ditargetkan

³⁴ Ibid., hal. 43 – 44.

³⁵ Lihat lampiran 1.

akan dicapai pada 2010 untuk ASEAN-6³⁶ dan pada 2015 untuk ASEAN-CMLV³⁷. ACFTA secara formal pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Sementara itu persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Dan persetujuan investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.³⁸

Adapun tujuan dari *Framework Agreement* tersebut adalah untuk (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua belah pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff; (c) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap pada kedua belah pihak.³⁹

3. Implementasi Penuh ACFTA

³⁶ ASEAN-6 meliputi negara anggota ASEAN, yaitu: Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

³⁷ ASEAN-CMLV meliputi negara anggota ASEAN, yaitu: Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam.

³⁸ Direktorat Kerjasama Regional, "*ASEAN-China Free Trade Area*", Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, hal. 1, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>, diakses 5 Maret 2016, jam 01:41.

³⁹ Sekretariat Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN, *Loc.Cit.*, hal. 75.

Sesuai dengan kerangka perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati dalam *The Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation* yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004. ACFTA secara penuh mengatur enam bidang yang menjadi tujuan utamanya. Dalam perdagangan barang ACFTA menyepakati diadakannya liberalisasi secara penuh pada tahun 2010 bagi negara-negara ASEAN-6 dan Chiana, serta pada tahun 2015 bagi negara-negara ASEAN-CMLV. Adapun kesepakatan bagi penurunan dan penghapusan tarif diatur dalam skema tiga tahapan, yaitu 1. *Early Harvest Program* (EHP); 2. *Normal Track*; 3. *Sensitive Track*, yang dibagi menjadi *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*.⁴⁰

1. *Early Harvest Program* (EHP)

EHP merupakan ketentuan yang mengatur percepatan dalam pelaksanaan ASEAN-China FTA yang diimplementasikan pada 1 Januari 2004, dimana pada awalnya terdapat pengecualian terhadap Filipina dikarenakan rumitnya permasalahan negosiasi dengan China sehingga Filipina dapat mengimplementasikan pada tahun berikutnya yaitu 2005. Produk-produk dalam EHP terdiri atas *Chapter* 1 sampai 8 dalam kerangka ACFTA,⁴¹ diantaranya: binatang hidup, daging dan produk daging untuk dikonsumsi, ikan, susu, tumbuhan, sayuran, serta buah, dan kacang-kacangan, yang terdiri dari 530 pos tarif. Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0 persen pada 1 Januari

⁴⁰ Edy Burmansyah, *Loc.Cit.*, hal. 37-38.

⁴¹ Lihat artikel 6 dalam lampiran 2.

2006. Dalam tahap EHP juga diatur mengenai *Rule of Origin* (RoO) yang mengikuti aturan dalam AFTA. RoO menyatakan bahwa produk yang mengalami penghapusan tarif harus memiliki 40 persen kandungan asli dari negara-negara ASEAN dan China.

2. *Normal Track*

Produk yang terdaftar dalam *Normal Track* merupakan produk yang tidak dimasukkan dalam program EHP. Dalam kesepakatan *Normal Track* yaitu mengatur barang yang akan dikenakan pengurangan atau penghapusan. *Normal Track* dikategorikan ke dalam 2 Tahapan *Track* yaitu: *Normal Track I* dan *Normal Track II*.⁴²

2.1 *Normal Track I*

Pada *Normal Track I* mengatur ketentuan terhadap negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN-6 serta China, untuk berkomitmen melakukan pengurangan atau penghapusan tarif dengan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Setiap pihak yang tergabung wajib mengurangi tarif 0-5% paling lambat pada 1 Juli 2005 dengan tingkat pengurangan tarif minimal 40% dari ketentuan tarif yang disepakati dalam *Normal Track*.

⁴² Vidya Manggiasih, "*Strategi Indonesia Menghadapi Ekspansi Pasar Cina dalam Ratifikasi Indonesia Terhadap ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*", (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010), hal. 37.

- b. Setiap pihak yang tergabung wajib mengurangi tarif 0-5% paling lambat 1 Januari 2007 dengan tingkat pengurangan tarif minimal 60% dari ketetapan tarif yang disepakati dalam *Normal Track*.
- c. Setiap pihak yang tergabung wajib menghapuskan semua tarif (0%) pada 1 Januari 2010 dengan ketetapan yang disepakati dalam *Normal Track*. Berikut tabel tahapan pengurangan tarif.

Tabel III.1
Skema Penurunan Tarif ACFTA⁴³

Tarif rata-rata	2005	2007	2009	2010
$X > 20\%$	20	12	5	0
$15\% < X < 20\%$	15	8	5	0
$10\% < X < 15\%$	10	8	5	0
$5\% < X < 10\%$	5	5	0	0
$X < 5\%$	Tetap	Tetap	0	0

Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat, pada tahun 2009, seluruh produk dengan tingkat awal tarif sebesar 10% hingga 20% harus diturunkan menjadi 5%, sedangkan produk dengan tingkatan awal tarif di bawah 10% harus diturunkan menjadi (0%). Kemudian pada 2010 seluruh produk yang

⁴³ Keuangan Republik Indonesia, <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AC-FTA>, diakses 5 Maret 2016, jam 02:19.

tedaftar dalam *Normal Track* harus diperdagangkan tanpa adanya pengenaan tarif.

2.2 *Normal Track II*

Pada masing-masing negara anggota memiliki kemudahan dalam menentukan beberapa tarif dibawah ketentuan *Normal Track*, namun tidak melebihi dari 150 pos tarif yang selambat-lambatnya pada Januari 2012. Tepat setelah 1 Januari 2012 tarif akan menjadi 0% dan semua pihak diharuskan untuk menghapus semua tarif.⁴⁴

3. *Sensitive Track (ST)*

Produk-produk yang tergolong sensitif akan memerlukan waktu dalam penyesuaian diri dan ASEAN memberlakukan secara bertahap sebelum dapat dimasukkan untuk liberalisasi. Produk yang dimasukkan ke dalam katagori *Sensitive Track* dibagi menjadi, yaitu *Sensitive List (SL)* dan *Highly Sensitive List (HSL)*.⁴⁵

Sensitive List terdiri dari 304 produk antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alas Kaki: sepatu sport. Casual, kulit; Kacamata; Alat Musik; tiup, petik gesek; Mainan: boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Sparepart; Alat Angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik. Produk-produk tersebut harus dikurangi menjadi 20% pada tahun 2012 dan 0-5% pada tahun 2018.

⁴⁴ Ibid., hal. 37-38.

⁴⁵ Edy Burmansyah, *Loc.Cit.*, hal. 37-38.

High Sensitive List terdiri dari 47 produk antara lain terdiri dari 47 produk antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan Tekstil; Produk Otomotif; Produk Keramik. Dalam hal ini ketentuan tarif yang ditetapkan bagi negara anggota ASEAN-6 dan China dalam HSL tidak lebih dari 40% dari jumlah dari daftar tarif dalam *Sensitive Track*.

Pada dasarnya mekanisme penurunan tarif dalam ACFTA dilakukan untuk mempermudah negara-negara yang menyepakati dalam mempersiapkan komoditi yang diperdagangkan, oleh karena itu dilakukan secara bertahap. Bagi negara-negara anggota WTO, sebenarnya telah mempunyai mekanisme pengurangan tarif sendiri atau dapat disebut sebagai tarif MFN. Namun, setelah ACFTA disepakati maka komoditi yang diperdagangkan menggunakan mekanisme pengurangan tarif dalam ACFTA sehingga tarif yang dikenakan hanya sebesar 0% pada tahun 2010.

Dalam kerangka ACFTA tidak lepas untuk menetapkan liberalisasi pada bidang jasa dan investasi. Persetujuan pada bidang jasa dalam ACFTA telah berlaku sejak juli 2007. Dengan adanya persetujuan bagi para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus *National Treatment* untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing pihak ACFTA. Sedangkan persetujuan pada bidang investasi, kepala pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitas, transparansi dan iklim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, dengan disertai

berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama pada bidang investasi yang disepakati pada tahun 2009.⁴⁶

Perjanjian kerjasama ACFTA tidak hanya sekedar perjanjian perdagangan bebas melainkan telah mengadopsi model perdagangan abad 21 yang berporos pada perdagangan jasa dan investasi. Dalam perdagangan abad 21, keterkaitan antara perdagangan dan jasa-investasi memiliki hubungan yang kompleks. Produksi barang-barang dapat dikategorikan sebagai jasa-jasa, dan sebaliknya; jasa dapat dikategorikan sebagai barang. Demikian dengan investasi yang merupakan sebagai perdagangan, dan sebaliknya. Dalam hal ini perdagangan abad 21 dikenal sebagai perdagangan rantai pasokan (*supply chain trade*).

4. Kendala dalam Penerapan ACFTA

Dalam suatu penerapan kebijakan pada dasarnya menuai pro dan kontra, tidak tekecuali dalam pembentukan ACFTA. Beberapa ahli peneliti menyebutkan adanya efek positif dari terbentuknya ACFTA terhadap hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi antara kedua belah pihak, terutama hasil yang diutarakan oleh ASEAN-China *Expert Group*, yang merupakan rujukan atas terbentuknya ACFTA.

Masalah fundamental dari terbentuknya ACFTA adalah kurang mewakilinya ACFTA atas kelompok-kelompok masyarakat, misal kelompok pengusaha swasta, dalam proses pembuatan kebijakan perdagangan tersebut. Dan

⁴⁶ Ibid., hal. 38-39.

kurang transparan dalam terbukanya proses pengambilan kebijakan yang mengakibatkan penerapan skema dalam ACFTA tidak terlalu dikenal dikalangan masyarakat ASEAN. Sehingga dalam penerapan skema tersebut diberlakukan secara penuh pada 2010 bagi ASEAN-6, maka banyak menuai protes dari kalangan pengusaha, seperti Indonesia dan Thailand.⁴⁷ ASEAN telah membagi penerapan skema ACFTA kedalam beberapa tahap, termasuk *Early Harvest Program* yang telah berlangsung sejak Januari 2006. Namun, dikarenakan kurangnya sosialisasi, maka banyak kalangan yang memprediksi skema tersebut akan langsung diterapkan menjelang tahun 2010 tanpa adanya persiapan yang cukup. Oleh karena itu, ASEAN yang selama ini hanya melibatkan aktor negara dalam penerapan berbagai program, harus mampu menggeser orientasi kepada aktor non-negara agar dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan, terlebih khusus dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan ekonomi. Karena akan sulit bagi ASEAN, jika pelaku ekonomi yang justru berjuang secara langsung dalam penerapan sebuah skema jika tidak mengenal program-program ekonomi ASEAN.

Selain hal-hal tersebut, masalah yang ditimbulkan oleh penerapan ACFTA tidak sekedar dari proses penerapan kebijakan yang kurang transparan, namun dampak dari segi ekonomi jangka pendek yang langsung dirasakan oleh pelaku usaha di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dan China lebih sering menekankan dampak jangka panjang dari penerapan ACFTA, namun dampak ekonomi jangka pendek patut diperhitungkan dari penerapan skema tersebut.

⁴⁷ D Pambudi & AC Chandra, "*Garuda Terbelit Naga*", (Jakarta: Institute for Global Justice 2006), hal. 44.

Salah satu dampak jangka pendek bahwa China menjadi pesaing bagi ASEAN dan berpotensi membuat produk-produk industri tekstil, mainan anak-anak, kendaraan bermotor, dan barang-barang elektronik di Asia Tenggara mengalami hambatan. China pada dasarnya telah berusaha meredam tanggapan negatif tersebut melalui mekanisme *Early Harvest Programe*. Dalam penurunan tarif dibelakukan secara sepihak dari pemerintah China atas skema ACFTA terhadap komoditi ekspor dari ASEAN, sehingga komoditi ekspor dari negara-negara ASEAN mendapatkan pengurangan tarif terlebih dahulu selama beberapa tahun (2004-2006), namun tidak berlaku sebaliknya bagi komoditi ekspor China yang masuk ke negara-negara ASEAN.⁴⁸

ASEAN sendiri secara tidak langsung telah menyadari akan konsekuensi jangka pendek, kerana setelah China resmi menjadi anggota WTO November 2001, maka hal ini merupakan pintu masuk bagi China untuk membanjiri pasar dunia dengan komoditi ekspornya. Melimpahnya komoditi ekspor China bukan hanya terjadi di Asia Tenggara melainkan di seluruh dunia.

Oleh karenanya, penerapan ACFTA menuai banyak kritikan di masa awal penerapannya. Penyebab dari terwujudnya ACFTA tidak hanya karena segi perekonomian, namun ada motivasi politik dalam mewujudkannya. Disamping itu, sesuai pandangan neoliberal tentang perdagangan bebas, maka manfaat jangka panjang dari mekanisme ACFTA diharapkan dapat terwujud dengan semakin terciptanya interdependensi baik ekonomi maupun politik di antara kedua belah

⁴⁸ Ibid., hal. 43.

pihak ASEAN dan China. Dampak jangka pendek dari penerapan skema ACFTA tentu untuk melemahkan sektor manufaktur negara-negara ASEAN seperti pada komoditi tekstil. Sebagai timbal balik, China memberikan keuntungan kepada ASEAN melalui ekspor komoditi barang jadi, sebagai penunjang dari kelangsungan proses industri yang terjadi di China. Sebagai produsen bahan baku dan energi, negara-negara ASEAN akan diuntungkan, namun sebagai produsen barang-barang manufaktur, China akan lebih diuntungkan.